

Resonansi Kebangsaan: Pancasila dalam Pusaran Globalisasi

Suhardi Alius

Sekretaris Utama Lemhannas RI
e-mail: hardialius@hotmail.com

Abstrak

Globalisasi menghadirkan tatanan baru dunia yang lebih terbuka akan informasi dan modernisasi. Globalisasi tidak hanya memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga tidak lepas dari pengaruh negatif yang dibawanya dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Dihadapkan pada persoalan globalisasi, tulisan ini memberikan potret bagaimana implementasi Pancasila sebagai sumber nilai bagi adanya hukum dan kepribadian bangsa Indonesia di tengah-tengah pusaran globalisasi. Pancasila dalam pusaran globalisasi harus tetap menjadi prinsip dan ideologi kebangsaan yang mampu membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa kita adalah bangsa yang terhormat di dunia bukan sebaliknya.

Kata Kunci: Pancasila, Globalisasi, Modernisasi dan Indonesia.

Pendahuluan

Era globalisasi telah merubah tatanan dunia di mana setiap sisi kehidupan di belahan dunia manapun dengan cepat dapat disampaikan dan disaksikan oleh masyarakat di mana pun berada.¹ Globalisasi membawa pengaruh positif dilihat dari aspek politik, seperti pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Dari aspek ekonomi, seperti terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dari aspek sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju.

¹ Hal ini didukung oleh John Baylis dan Steve Smith dalam *The Globalization of World Politics* yang menguraikan globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya keterkaitan antar masyarakat sehingga satu peristiwa terjadi di wilayah tertentu semakin lama akan kian berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat yang hidup di bagian lain di muka bumi. Lihat selanjutnya John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford : Oxford University Press, 1997).

Namun demikian, globalisasi pun tidak lepas dari pengaruh negatif yang dibawanya dalam berbagai sisi kehidupan pula. Dari aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc. Donald, Coca Cola, Pizza Hut, dll.) membanjiri Indonesia. Berbagai hasil sandang, papan dan barang-barang impor memenuhi pasar domestik tanpa peduli nasib para penghasil produk lokal yang kesusahan untuk bersaing dengan produk-produk impor tersebut.²

Aspek yang paling memprihatinkan akibat pengaruh dari globalisasi adalah kehidupan sosial budaya masyarakat yang selama ini dikenal sebagai komunitas tradisional yang hidup guyub-rukun, sederhana, rajin, gotong-royong, dan religius.³ Masyarakat memperagakan individualis, krisis nilai-nilai kebangsaan, lebih mementingkan kepentingan individu atau golongannya dari pada untuk kepentingan Negara atau pemerintah.

Masyarakat Indonesia, berangsur telah berubah menjadi masyarakat konsumen dari arus barang-barang produksi dari negara-negara kapitalis, yang lazim dibeli secara kredit, bergaya hidup mewah yang penuh ditempli atribut-atribut konsumtif dan hedonis.⁴ Impian masyarakat yang adil dan makmur seakan *utopis* di tengah sebagian besar masyarakat dilanda utang di *counter-counter* HP, *developer* perumahan, *showroom* motor dan mobil, toko elektronik, toko komputer, tempat pegadaian, bank-bank penyalur kredit, dan sebagainya.

² Udiyo Basuki, "Peranan Pemerintah Daerah Melindungi Produk Lokal Menghadapi Globalisasi" *Az Zarka'*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014), 67-82.

³ Menurut Anthony Giddens dalam bukunya *Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991) menjelaskan bahwa globalisasi sebagai sebuah proses sosial ditandai dengan semakin intensifnya hubungan sosial yang mengglobal, pada kenyataannya yang mengalami globalisasi adalah nilai-nilai modernitas yang berekspansi ke wilayah-wilayah tradisional, terutama ke daerah pedesaan dan pinggiran. Modernitas melakukan de-tradisionalisasi yang diciptakan oleh globalisasi. Modernitas sebagai sebuah gerakan yang mengglobal terus melakukan tekanan pada tradisionalisme.

⁴ Haedar Nashir, "Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan," *Jurnal Inovasi*, No. 1. TH. VIII (1998), 6.

Pancasila dalam pusaran globalisasi

Globalisasi sebagai fenomena arus global dalam peradaban manusia telah mentransformasi kehidupan masyarakat secara ekonomi maupun sosial budaya. Arus globalisasi yang terus berlangsung menyebabkan seseorang atau sekelompok orang maupun satu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan. Hal itu pulalah yang menyebabkan budaya-budaya asing dapat dengan mudah masuk ke dalam suatu negara.⁵ Mudah-mudahan masyarakat suatu bangsa menerima suatu budaya asing dalam kehidupannya, disebabkan karena unsur budaya asing tersebut membawa kemudahan bagi kehidupan masyarakat bangsa tersebut.

Pada umumnya, unsur budaya yang membawa perubahan sosial budaya dan mudah diterima masyarakat karena beberapa hal. Pertama, unsur kebudayaan tersebut membawa manfaat yang besar. Kedua, peralatan yang mudah dipakai dan memiliki manfaat. Ketiga, unsur kebudayaan yang mudah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur tersebut.

Karena sisi manfaat inilah, masyarakat suatu bangsa secara tidak sadar melupakan ideologi negaranya. Derasnya pengaruh nilai-nilai budaya global, tentu saja menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti semakin tajamnya kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan timbul kecemburuan sosial, menajamnya konflik rasial, memudarnya nilai-nilai budaya asli dan sebagainya.

Bagi bangsa Indonesia, derasnya pengaruh nilai-nilai budaya global mengaburkan keberadaan Pancasila sebagai ideologi, falsafah hidup bangsa dan dasar negara. Budaya yang cenderung mengedepankan demokrasi, namun masih kurang mengedepankan sikap dan perilaku yang toleran. Akibatnya, sebagai bangsa yang majemuk, kebhinekaan Indonesia terus diuji dengan berbagai peristiwa kekerasan, kerusakan yang berbau SARA. Masyarakat mulai lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan mengubah arah ideologi Pancasila. Jika hal tersebut terjadi maka rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

⁵ Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).

Di tengah pusaran arus globalisasi dunia, bangsa dan negara Indonesia tak mesti kehilangan jati diri, kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. Rakyat yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, tetapi kemajuan tersebut akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka kehilangan jati diri yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur Pancasila. Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia.

Namun demikian, diperlukan suatu pengawasan dalam mengaudit berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU sampai ke peraturan paling rendah. Saat ini belum ada mekanisme dan kelembagaan yang berfungsi sebagai pengawasan eksekutif (*executive review*) yang secara khusus diberi tugas untuk memasyarakatkan dan mengawasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana mestinya.⁶ Mekanisme yang ada hanya pengawasan hukum melalui peradilan (*judicial review*) baik melalui Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang maupun melalui Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan di bawah undang-undang.

Akibatnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum bagi kehidupan hukum Indonesia tidak tercermin dalam peraturan perundang-undangan seperti dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah (Perda) terjebak dalam pandangan yang sempit, serta sikap monopoli terhadap sumber daya daerah, bahkan menjadi penghambat pembangunan nasional. Sebagian besar perda-perda menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan membuat sejumlah investor enggan berhubungan dengan suatu daerah yang dinilai memiliki urusan berbelit-belit. Sehingga muncul anekdot yang bernada satir, “keluar mulut Pungli, masuk mulut Perda.”

Saat ini telah timbul beberapa persoalan yang mencerminkan krisis identitas bangsa, antara lain: *Pertama, Menurunnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.* Nilai-nilai tradisional masyarakat yang tumbuh sejak ratusan tahun lalu seperti gotong royong dan hidup berdampingan secara

⁶ Permasalahan ini telah diungkapkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, dalam orasi ilmiahnya “*Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi (Moral and Ideological Reading Of The Constitution).*” Disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Pancasila, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 26 Mei, 2012.

damai, belakangan ini tampaknya tidak lagi bersinar cerah. Berbagai perubahan sosial dan perilaku buruk di kalangan warga masyarakat pun semakin menggelisahkan. Kelompok-kelompok radikal tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat yang meresahkan kelompok-kelompok minoritas. Semua itu menjadi indikator menurunnya penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, Euforia demokrasi yang kebablasan. Dalih “Demokrasi” telah membawa berbagai tindakan yang justru menimbulkan keresahan, unjuk rasa kerap diwarnai perusakan berbagai fasilitas publik, aksi brutal main hakim sendiri hingga konflik yang menimbulkan korban jiwa sering kita saksikan di berbagai media massa. Keamanan, ketertiban dan kepatuhan terhadap rambu-rambu hukum pun menjadi terancam. Atas nama keadilan, demokrasi dan HAM, berbagai rambu-rambu hukum dilanggar. Bahkan eksekusi dari demokratisasi kerap kali diwarnai dengan berbagai konflik kekerasan.

Ketiga, daya perekat (Koheesi) sosial masyarakat menurun sehingga rentan konflik bernuansa kekerasan. Realitas kehidupan sosial masyarakat dalam keberagaman sering diwarnai berbagai letupan konflik yang berlatar belakang mayoritas-minoritas, pribumi-pendatang, perbedaan suku maupun agama. Tatkala bangsa kita masih menganggap mayoritas adalah prioritas, penghormatan terhadap keberagaman itu sendiri takkan pernah terjadi. Seringkali pula masih ditemukan adanya kecurigaan atau kesinisan dari kelompok yang sudah lebih dulu tinggal dan menetap terhadap pendatang.

Keempat, kesenjangan yang memicu kecemburuan sosial. Era global tidak saja membawa letupan-letupan konflik akibat eksekusi budaya, tapi dilatarbelakangi pula pada distribusi ekonomi yang tidak merata. Kesenjangan antar-kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi, pendapatan per kapita, kesempatan memperoleh pendidikan, perbedaan dalam mengakses fasilitas pemerintah, telah memicu kecemburuan sosial. Persoalan-persoalan tersebut menimbulkan prasangka atau kontroversi hingga berakhir dengan konflik yang berbuah kekerasan.

Sangat wajar apabila berbagai penanganan oleh aparat penegak hukum hanya berhasil meredam konflik sesaat saja dan setiap saat dapat selalu muncul ke permukaan yang meresahkan rasa aman dan ketentraman kehidupan masyarakat. Karena persoalan sesungguhnya bukan di hilir

di mana konflik dapat dipicu hanya alasan *sepele*, tetapi di hulu yang dapat menjadi faktor penyebab dan motif yang melatarbelakangi suatu peristiwa yang dalam hal ini adalah faktor kesenjangan ekonomi.

Generasi Muda sebagai Tulang Punggung Bangsa

Banyak sekali kejadian-kejadian yang menjadi ironi sebagai bangsa yang menganut asas-asas Pancasila, seperti tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, perbuatan-perbuatan amoral yang terkait antara lain dengan masalah seksual, narkoba, kecurangan dalam proses pendidikan, pemalsuan-pemalsuan ijazah dan sertifikat, dan sebagainya.

Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa tidak lepas dari berbagai perilaku yang memprihatinkan tersebut. Apakah ada yang salah dengan pendidikan nasional yang merupakan tempat belajar tentang aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, maupun keterampilan? Cobalah generasi muda kini, tanyakan kepada mereka tentang siapakah pahlawan-pahlawan nasional kita? atau jangan-jangan mereka sudah lupa 5 (lima) sila dalam Pancasila? seberapa ingat lagu-lagu nasional dibandingkan lirik *K-pop* yang sering dimainkan dalam *gadget* mereka.

Meskipun masih terdapat jiwa nasionalisme pada sebagian pelajar dan mahasiswa yang belum luntur yang diwujudkan dalam berbagai prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Namun tren global seakan menjebak generasi muda sehingga mereka lupa tanggung jawabnya sebagai tulang punggung bangsa dan negara. Tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang melakukan tindak kriminalitas, hidup hura-hura, dan terseret arus budaya global yang liberal, bahkan terjebak narkoba yang angkanya setiap tahun cenderung meningkat.

Arus globalisasi yang mengalami percepatan dengan perkembangan teknologi informasi merasuk ke dalam masyarakat menawarkan berbagai gaya hidup.⁷ Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. *Handphone* dan *gadget* pelengkap lainnya sebagai perangkat mobile internet yang dapat menggenggam segala sisi dunia ke dalam saku celana para pemiliknya.

⁷ Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya" *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 1 (2014), 33-47.

Perkembangan tersebut tidak saja bermanfaat tetapi berdampak negatif pula. Interaksi hingga kepekaan sosial dapat menjadi tumpul, tergantikan dengan sifat individualisme yang sangat sibuk bersosial media di dunia maya. Tidak sedikit generasi muda terjebak dalam absurditas yang telah membuat generasi saat ini mengarah pada krisis kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia.

Efek buruk lingkungan menjadikan generasi muda kehilangan landasan visional yang seharusnya melekat pada setiap diri sebagai generasi bangsa. Generasi muda *bak* tidak mengenal cara memandang sejarah dan budaya bangsanya, kehilangan rangsangan dan tanggung jawab untuk membangun dan memperkuat bangsa dan negara. Wawasan nusantara tenggelam dan tak lagi tercermin dalam setiap interaksi kehidupan bermasyarakat. Disorientasi wawasan nusantara menjadi salah satu alasan mudahnya generasi muda terlibat dalam isu kekerasan dan radikalisme.

Pemuda yang dipahami memiliki kondisi mental masih labil sehingga sangat rentannya generasi muda dimasuki ideologi radikal bahkan paham terorisme karena mereka masih dalam tahap perkembangan sehingga mudah terpengaruh.⁸ Para aktor teroris memanfaatkan kelabilan generasi muda baik pelajar maupun mahasiswa dengan merekrut mereka, karena dianggap sangat strategis dalam menyukseskan aksinya. Selain itu, faktor idealisme yang tinggi, serta rasa solidaritas yang kuat terhadap golongan tertentu yang mereka masuki. Diperkuat juga dengan kondisi psikologi pelajar dan mahasiswa yang masih dalam proses pencarian jati diri, tentu menjadi sangat rentan terhadap doktrin-doktrin tertentu, termasuk dengan doktrin terorisme itu sendiri.

Fakta ini dapat dilihat dari berbagai aksi terorisme di Indonesia melibatkan generasi muda. Enam terduga teroris Klaten dari satu sekolah, terutama yang dicoba diindoktrinasi, adalah pelajar kejuruan (SMK) yang memiliki keahlian merakit barang-barang elektronik. Keterlibatan anak muda yang bernama Dani Dwi Permana (18 tahun)

⁸ Fenomena tersebut di atas bukanlah tanpa dasar, pemuda (*youth*) dalam kamus Websters oleh Princeton telah mendefinisikannya sebagai "*the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemuda masih rawan terpengaruh dari pihak luar karena sifatnya yang masih labil dan kontrol emosi yang masih susah dikendalikan.

sebagai "pengantin" (istilah untuk pelaku bom bunuh diri) di JW Marriott Kuningan adalah salah satu contoh betapa gerakan terorisme telah melakukan rekrutmen anggota di kalangan generasi muda. Begitu pula aksi terorisme di awal tahun 2016 di Jakarta yang dikenang dengan "Bom Thamrin" menjadi saksi begitu rentannya generasi muda disusupi oleh paham radikalisme.⁹

Pembangunan jiwa nasionalisme adalah pekerjaan yang sangat penting. Pemerintah maupun rakyat pada umumnya, dan pelajar serta mahasiswa pada khususnya, harus bisa mempunyai rasa kebanggaan akan bangsa dan negaranya. Pemerintah juga harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme tersebut, melalui pemberian materi pelajaran, penanaman nilai-nilai budaya bangsa dan nilai moral keagamaan. Apabila pelajar dan mahasiswa tidak lagi punya rasa nasionalisme, maka pembangunan di negeri ini akan terhenti karena tidak ada yang ingin berbakti dan berkarya untuk negara dan bangsanya.

Kepentingan Politik dan Krisis Keteladanan

Yudi Latif melukiskan krisis multidimensional yang mendera Indonesia saat ini bukanlah sembarang krisis yang bisa dihadapi secara tambal sulam. Krisis ini begitu luas cakupan dan dalam penetrasinya, menyerupai situasi "zaman peralihan" (*axial age*) dalam gambaran Karen Armstrong, zaman *jahiliyah* (*kalabendu*) yang penuh prahara, pertikaian, kedunguan, kehancuran tata nilai dan keteladanan.¹⁰

Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis yang menimbulkan korban jiwa dan materi. Ketidakpuasan satu kelompok terhadap kelompok yang lain diekspresikan dalam bentuk penggalangan massa secara kolosal untuk pamer kekuatan dan melakukan tindakan anarkis. Tidak jarang sebagian elit menggunakan emosi rakyat sebagai

⁹ Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 di jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Akibat kejadian ini, delapan orang tewas, termasuk empat orang pelaku teror yang merupakan anak muda, yaitu Afif atau Sunakin, pelaku, tewas ditembak polisi di depan Starbucks; Moh. Ali, pelaku, tewas ditembak polisi di depan Starbucks; Dian Joni Kurniadi, tewas akibat ledakan di pos polisi; Ahmad, tewas meledakkan diri di dalam Starbucks.

¹⁰ Lihat tulisan Yudi Latif, "Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara", <http://www.aktual.co> (26 Mei 2013).

alat untuk memaksakan kehendak mereka. Kerap kali elit-elit tertentu menunggangi emosi rakyat sebagai alat menggolkan kepentingan tertentu. Krisis nilai yang berlangsung sesungguhnya tidak terlepas dari sinyalemen lunturnya keteladanan di hampir setiap level elit pemerintahan. Contohnya ketidakteladanan makin telanjang dipertontonkan, seperti berbagai kasus yang menjerat pejabat pemerintahan maupun elit partai. Minimnya keteladanan membuat rakyat apatis dan menimbulkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Budaya politik yang mengedepankan demokrasi namun masih kurang mengedepankan sikap dan perilaku yang tidak etis, masih mengedepankan ego kelompok atau golongan daripada kepentingan nasional. Tarik-menarik kepentingan partai baik dilatari oleh berbagai agenda sesaat maupun dalam rangka kemenangan pemilihan kepala-kepala daerah dan perwakilan yang akan duduk di lembaga legislatif. Praktek politik pun berlanjut ketika mereka menempati jabatan-jabatan politik baik di pemerintahan maupun di legislatif. Hal ini dapat dilihat dari sangat kuatnya pengaruh kepentingan kelompok atau partai dalam proses perumusan perundang-undangan yang mengatur kehidupan kemasyarakatan di segala bidang. Proses tersebut dapat diamati dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan politis bersifat pragmatis daripada cita-cita membangun suatu sistem hukum yang memiliki jiwa dan karakter ke-Indonesia-an untuk mendukung pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara.¹¹

Berbagai produk UU dan perubahan-perubahannya belum mampu sepenuhnya dirasakan membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Karena perubahan-perubahan tersebut sarat akan kepentingan kelompok/golongan dari pada kepentingan nasional. Sepanjang era reformasi, kita telah membentuk ratusan undang-undang, baik undang-undang baru maupun perubahan atas undang-undang lama, baik yang mengatur hukum materil maupun hukum formil sebagai instrumen penegakan hukum. Namun tidak sedikit produk UU yang lahir tanpa ada *grand*

¹¹ Ferry Irawan Febriansyah, "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang," *Perspektif*, Volume XVII. No.3. (September 2012); 184-190; Mukhtar Lutfi, "Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik" *Al-Risalah*, Volume 10. No. 2 (November 2010), 265-272.

design (rencana induk) yang jelas dan terarah. Akibatnya, berbagai produk UU yang dihasilkan bersifat reaktif, tambah sulam, bersifat rakitan, dan bongkar pasang. Kenyataannya, begitu banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dicabut, lalu diganti lagi dengan peraturan baru, dan seterusnya.¹²

Situasi tersebut kemudian mengalami komplikasi dengan permasalahan etika politik yang rawan manipulasi, akuntabilitas politik yang rendah, permasalahan korupsi yang terdapat pada lembaga-lembaga penting penyelenggaraan negara. Para petualang politik pun mencari-cari momentum yang tepat bagi mereka untuk nimbrung dalam kekisruhan politik demi mendapatkan keuntungan dalam situasi tersebut. Kondisi demikian memperlihatkan terabaikannya etika politik yang diharapkan mampu menjinakkan perebutan kekuasaan. Etika politik gagal mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil terutama dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan substansial.

Berbagai peristiwa di tingkat elit menjalar dan ikut mempengaruhi sosial politik di daerah, membawa masyarakat kepada krisis figur elite politik yang dapat menjadi patron masyarakat. Akibatnya, kelompok-kelompok masyarakat mulai dari rakyat biasa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok agama, golongan dan lain sebagainya terbiasa dan cenderung berpikir untuk kelompok atau golongannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih besar.

Berbagai peristiwa tidaklah berdiri sendiri, tetapi memiliki resonansi, yang saling berkaitan, memberikan pengaruh dan ikut menggetarkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Resonansi ini dapat diamati dari peristiwa yang terjadi di bangsa ini maupun dalam kehidupan global yang cepat merambat ke berbagai pelosok kehidupan masyarakat melalui perkembangan media. Kecepatan informasi global, media sosial, regulasi di bidang komunikasi, kebebasan akses situs, alat politik, bahkan menjadi alat propaganda dan berbagai tindak kekerasan dan gejolak sosial di suatu daerah.

Pola komunikasi maupun prilaku elit seperti penyalahgunaan

¹² AM. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009); Riza Sihbudi & Moch. Nurhasim (eds), *Amandemen Konstitusi & Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia* (Jakarta: AIPI, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2002), 447-484.

kewenangan hingga korupsi sudah menjadi tontonan yang tidak asing lagi di media-media televisi maupun perbincangan di sosial media. Tak urung isu-isu politik lebih banyak mengandung perdebatan negatif daripada tindakan solutif yang nyata.

Mencerminkan Nilai-nilai Pancasila

Demokrasi yang dikehendaki sebagai pilihan sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia. Namun dalam perjalanan sistem demokrasi Pancasila lebih banyak diucapkan dalam ruang-ruang seminar daripada tercermin dalam semangat kebangsaan, sehingga yang terwujud adalah kebebasan atas nama demokrasi tapi bias berbagai kepentingan politik.

Saat ini pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi relatif kurang memenuhi harapan. Kondisi ini tidak lepas dari penerapan Pancasila sebagai ideologi negara selama orde baru terkesan digunakan sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaan. Pasca reformasi, tiba-tiba konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat mengusik kerukunan berbangsa dan bernegara. Ibarat panas setahun dihapuskan hujan sehari.

Globalisasi pun mendapatkan jalan mulus dalam mengisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Semacam muncul stimulus perubahan kepribadian pelbagai pihak dalam waktu sekejap. Para pemburu kekuasaan pun menjadikannya senjata dalam berseteru, meraup aset dan pengaruh. Pada situasi seperti ini sebaiknya semua pihak harus kembali memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. Sampai kini bangsa Indonesia masih tetap utuh dan bersatu, hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila telah ada sejak dahulu kala dan melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila menjadi filter nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam

memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Dengan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, keberagaman dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia baik dari segi ras, etnis, budaya, bahasa, dan agama, tidak menjadikan bangsa ini tercerai-berai, akan tetapi justru merupakan kekuatan bangsa dan Negara Indonesia di tengah pergaulan dunia.¹³

Meskipun konstitusi Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak empat kali, MPR memutuskan untuk mempertahankan bagian pembukaan (*Preamble*) yang memuat dasar negara. Keputusan untuk mempertahankan pembukaan UUD 1945 adalah penegasan terhadap kokohnya ideologi negara yang berdasarkan Pancasila. Keputusan tersebut seharusnya tidak berhenti pada upaya mempertahankan landasan konstitusi tersebut, tetapi diperlukan langkah-langkah selanjutnya agar berbagai produk perundang-undangan yang lahir terhindar dari kepentingan-kepentingan politis bersifat pragmatis.¹⁴ Oleh karena itu, harus ada *grand design* yang jelas terhadap berbagai produk hukum yang berlandaskan dan dijiwai oleh norma dasar (*grund norm*) landasan ideal Pancasila dan UUD.

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga pengawasan eksekutif (*executive review*) sehingga Pancasila dan UUD 1945 tercermin dan terjabarkan dalam berbagai norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU sampai ke peraturan paling rendah. Lembaga baru tersebut tidak hanya diberi tugas pengkajian, koordinasi pendidikan, dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga diberi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas dan legalitas atas undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang terhadap norma hukum yang lebih tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dikatakan sebagai pengujian eksekutif, karena dilakukan oleh lembaga eksekutif, bukan lembaga peradilan. Hasil kerjanya yang justru dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang bersifat final dan mengikat, yaitu untuk undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan untuk peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Lembaga

¹³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹⁴ AM. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, 34-37.

ini dapat diberi fungsi pengkajian, pengawasan, dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 sekaligus. Lembaga ini menjadi semacam 'legal auditor' terhadap semua produk peraturan perundang-undangan sebagai cermin kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang diberlakukan dalam praktik kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁵

Agar Pancasila dan UUD tercermin pada setiap produk hukum, maka para pembuat peraturan perundang-undangan dan pelaksana dituntut untuk tidak hanya harus cerdas, memiliki pengetahuan yang dalam dan luas, serta bijaksana, tetapi juga harus memiliki kesadaran konstitusional (*constitutional awareness*) dan kepekaan konstitusional (*constitutional sensitivity*).

Keteladanan dan Semangat Kebangsaan

Masalah kebangsaan tidak cukup dengan menggunakan akal dan logika tetapi juga hati. Kejujuran, nafas spiritual, empati dan nilai-nilai kebaikan hendaknya terpelihara dan mengisi kultur sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Nilai-nilai kebangsaan sangat penting yang tidak sekedar mengingatkan kita akan sejarah berdirinya NKRI. Negara ini tidak dibangun dalam sehari tetapi memakan usia dan mengurai darah, airmata. Apa yang menjadi sejarah perjalanan bangsa ini tidak cukup dengan peringatan seremonial pada momentum satu waktu tertentu, tetapi pengorbanan jiwa dan raga di masa lalu harus mampu membangkitkan generasi masa kini dan akan datang, menginspirasi, mengembangkan dan memelihara semangat kebangsaan, serta hasrat mewujudkan cita-cita menuju bangsa yang makmur.

Elite pemerintah maupun pejabat negara mempunyai tugas yang tidak ringan karena berkewajiban untuk menciptakan kesatuan dan rasa kebersamaan yang merupakan dasar pokok bagi terwujudnya suatu *nation and state building* yang kokoh. Bangsa ini memerlukan keteladanan dalam setiap sikap dan perilaku dari para penyelenggara negara, baik pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

¹⁵ Lihat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi (Moral and Ideological Reading of The Constitution)*. Orasi Ilmiah dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Pancasila, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 26 Mei, 2012.

yudikatif maupun pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dan harus selalu memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum (*law in action*). Meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat, profesional, taat hukum, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari KKN.

Seluruh elemen bangsa bersikap peka dan turut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara yang bersifat konstruktif, atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing. Dalam membangun semangat kebangsaan memerlukan *role* yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat.

Pertama, para elit di lembaga pemerintah maupun legislatif mengedepankan visi kebangsaan yang tercermin dari setiap sikap dan perilakunya di tengah masyarakat, mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan dan partai demi kokohnya ketahanan nasional.

Kedua, partai politik senantiasa memberikan pemahaman nilai-nilai demokratisasi kepada masyarakat dengan mengedepankan rasa nasionalisme daripada kepentingan sempit yang merusak harmoni kerukunan masyarakat. Hal ini dimulai dari peran dan fungsinya sebagai wadah aspirasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemilu dan kampanye politik, persaingan politik dilakukan dalam koridor yang santun dan terhormat.

Ketiga, peran pejabat pemerintahan senantiasa memiliki *sense of crisis* (rasa peka terhadap krisis yang terjadi). Kepekaan terhadap perubahan dan kemampuan analisa dampaknya. Kepedulian terhadap rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi tercermin dalam kebijakan maupun dalam tindakan nyata dari setiap para pejabat pemerintahan.

Keempat, peran pejabat pemerintahan dalam membangun komunikasi publik. Ruang komunikasi publik yang disediakan mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Para pejabat pemerintah diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Para pejabat pemerintah mampu memfilter untuk *release* kebijakan pemerintah/pimpinan agar tidak bias dan menimbulkan kontra produktif.

Oleh karena itu, harus diimbangi dengan kemampuan menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Hal ini menuntut kecepatan dan ketepatan dalam merespon dan mengklarifikasi isu yang belum berkembang khususnya yang menyangkut bidangnya sebelum menjadi opini negatif. Semangat kebangsaan dapat *dipupuk* dan terpelihara dengan baik melalui sikap dan perilaku yang baik dapat dimulai dari diri sendiri. Misalnya, mengutamakan “kewajiban” dari pada “hak” mengutamakan “tugas dan tanggung jawab” dari pada “wewenang” senantiasa memelihara moral dan kejujuran apapun profesi kita.

Pikiran jernih akan melahirkan keinginan yang baik. Keinginan yang baik akan lahirkan pilihan yang baik. Pilihan-pilihan yang baik akan lahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menciptakan situasi yang baik. Situasi yang baik akan merajut masa depan yang baik. Optimis dan senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita miliki. Hidup bukan hanya selalu mengambil dan mempunyai, tetapi hidup juga untuk memberi dan berbagi.

Dengan demikian, proses reformasi dan transformasi *character building* mengarah pada terbentuknya spirit nasionalisme yang tinggi, rasional dan obyektif, akuntabel, demokratis-populis, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta etis profesional.

Penutup

Pergaulan dunia yang damai dan bermartabat, sebagaimana digagas para pendiri Bangsa Indonesia memerlukan dukungan bukti dalam implementasi Pancasila secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pancasila akan senantiasa menjadi inspirasi dalam tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Negara Indonesia memiliki landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Pancasila dan UUD 1945 harus tercermin dan diterjemahkan dengan sungguh-sungguh dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam

setiap kebijakan publik, serta dalam setiap kebijakan bernegara dan berpemerintahan sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dalam rangka pembangunan nasional. Dengan demikian, hukum dan konstitusi dapat dilihat, dibaca dan dipahami dengan benar atas dasar moral dan ideologi yang melandasinya. Pancasila tidak hanya berisi rasionalitas ide-ide, tetapi juga mengandung muatan prinsip-prinsip moral dan ideologi kebangsaan kita yang mampu membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa kita adalah bangsa yang terhormat di dunia.¹⁶

Dengan landasan pijak yang kokoh dan karakter kepribadian dan spirit yang kuat maka tidak akan mudah terombang-ambing dalam deras arus globalisasi dan dipengaruhi oleh sistem hukum dari luar yang memiliki karakter kepribadiannya sendiri dengan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, penyelenggara negara wajib untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur sebagaimana ditandaskan dalam penjelasan umum UUD 1945. Dengan keteladanan para pemimpin akan mempengaruhi budaya masyarakat yang pada akhirnya akan memantapkan karakter bangsa.

Pada akhirnya diharapkan seluruh elemen bangsa bersikap peka dan turut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara yang bersifat konstruktif, atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing. Sebagai kalimat penutup, "Mari kita menyongsong Indonesia yang lebih baik dengan sentuhan wawasan kebangsaan di setiap profesi."

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. "Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945," dalam *Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi (Moral And Ideological Reading of the Constitution). Orasi Ilmiah*. Disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Pancasila, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 26 Mei, 2012.

Basuki, Udiyo. "Peranan Pemerintah Daerah Melindungi Produk Lokal Menghadapi Globalisasi," *Az Zarga'*, Vol. 6, No. 1. Juni 2014.

¹⁶ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi (Moral and Ideological Reading of the Constitution)*.

- Baylis, John dan Steve Smith. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Fatwa, AM. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang," *Perspektif*, Volume XVII. No. 3, September 2012.
- Giddens, Anthony. *Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford: CA. Stanford University Press, 1991.
- Latif, Yudi. "Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara", <http://www.aktual.co>. 26 Mei 2013.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lutfi, Mukhtar "Penerapan Asas Hukum dan Kepentingan Politik," *Al-Risalah*, Volume 10. No. 2. November 2010.
- Mahfud MD. "Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-Undangan." Disampaikan pada *Seminar Nasional "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan Indonesia,"* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta, 30-31 Mei 2007.
- Yasraf, Amir Piliang. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2. Nomor 1. 2014.
- Nashir, Haedar. "Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan," *Jurnal Inovasi*, No. 1. TH. VIII. 1998.
- Sihbudi, Riza & Moch. Nurhasim (eds). *Amandemen Konstitusi & Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*. Jakarta: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 2002.

